

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi, setiap negara dituntut untuk menunjukkan kualitas yang semakin membaik pada setiap tahunnya. Wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem akuntansi yang sesuai aturan pemerintah. Laporan keuangan sangat penting dalam mendapatkan informasi akuntansi dan mendapati hasil kinerja atas pengelolaan keuangan yang telah dicapai selama tahun anggaran bersangkutan. Pemerintah daerah mengharapkan bahwa laporan keuangan dapat membantu bidang sosial, politik, dan ekonomi untuk mengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban di pemerintah daerah (Nurmalia dan Achmad, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menegaskan ada empat karakteristik yang wajib terpenuhi agar suatu laporan keuangan dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan tersebut kemudian diaudit oleh BPK. Hal tersebut untuk memeriksa bahwa laporan yang disajikan sudah sesuai atau belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada 4 opini yang diberikan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP merupakan opini tertinggi bahwa laporan

keuangan disusun secara wajar. Sehingga tingkat kepercayaan atas laporan keuangan tersebut akan meningkat.

Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh Hasil Pemeriksaan BPK terus mengalami peningkatan. Akan tetapi BPK mendapati temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. Berdasarkan IHPS I Tahun 2020 ditemukan adanya 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 kelemahan sistem pengendalian dan 5.324 ketidakpatuhan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan 67% kerugian, 11% potensi kerugian, dan 22% kekurangan penerimaan.

Tabel 1. 1
Perkembangan opini LKPD tahun 2015 sampai 2019

Tahun	WTP	WDP	TMP
2015	58%	36%	5%
2016	70%	26%	4%
2017	76%	21%	3%
2018	82%	16%	2%
2019	90%	9%	1%

Sumber: IHPS I Tahun 2020 (<https://yogyakarta.bpk.id>)

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 sampai tahun 2019 terus menunjukkan peningkatan. Diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I Tahun 2020, hasil Pemeriksaan atas LKPD tahun 2019 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 485 LKPD (90%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 LKPD (9%), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 LKPD (1%). Dengan peningkatan

atas laporan keuangan yang berkualitas tersebut akan lebih memudahkan untuk menetapkan keputusan supaya bisa membawa instansi ke arah yang lebih baik serta memperoleh segala informasi kepada BPK. Berdasarkan pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD tahun 2020 opini WTP telah diraih Pemkot Yogyakarta. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Yogyakarta untuk konsisten dalam mengelola anggaran agar semakin baik dan berkualitas.

BPK RI menyampaikan bahwa masih ada temuan pemeriksaan untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Walaupun telah mencapai penghargaan opini WTP, namun masih terdapat beberapa temuan BPK yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Kota Yogyakarta. Permasalahan tersebut mengenai pengelolaan belanja, pengelolaan pendapatan, pengelolaan asset dan kekurangan volume pekerjaan dan barang (IHPS 1 Tahun 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan belum maksimal dan belum optimal. Terkait hal ini pengendalian internal, sumber daya manusia perlu diperhatikan, diharapkan berbanding lurus dengan perbaikan kinerja. Komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan motivasi juga harus diperhatikan guna terus-menerus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga yang direncanakan dalam anggaran pun dapat di realisasikan dengan baik.

Permasalahan mengenai laporan keuangan masih kerap ditemukan. BPK masih menemukan beberapa penyimpangan dan kejanggalan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menuntut tiap pengelola keuangan agar wajib berpengetahuan luas. Sehingga tidak menyesatkan para pengguna

laporan maupun pembaca pada laporan yang disajikan (Arifianti, Payamta dan Sutaryo, 2013). Karena tanpa pengetahuan yang baik mengenai laporan keuangan, akan mengakibatkan kesalahan material seperti pada penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya. Hal tersebut nantinya akan memicu kecurangan maupun korupsi yang dapat menimbulkan tuntutan hukum. Apabila terjadi terus menerus, pastinya masyarakat juga akan menanggung akibatnya. Seperti biaya transaksi yang tinggi dan buruknya pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah menetapkan untuk mewajibkan seluruh instansi sebagai penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksa kewajiban dan fungsi kepada pemberi amanat.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-anfal ayat 27)

Ayat diatas memberikan pedoman mengenai pentingnya memberikan kepercayaan dengan menjaga amanah yang telah diberikan seseorang. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh masyarakat sebagai pengelola roda pemerintahan yang baik. Kesadaran akan perlunya penerapan konsep amanah menjadi sangat penting, kesalahan dan kecurangan masih banyak terjadi pada setiap organisasi. Konsep amanah ini menjadi landasan bagi seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Harapannya pemerintah dituntut

agar lebih transparan dan akuntabel pada proses pengelolaan keuangan, dengan demikian laporan keuangan yang disajikan akan berkualitas.

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini yang pertama yaitu pengendalian internal. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang terus menerus dilaksanakan pimpinan dan semua pegawai dengan tujuan memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yaitu dengan kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan dalam melaporkan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada undang-undang. Menurut BPK RI, faktor penyebab pengecualian opini LKPD disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern sehingga kesalahan dan penyimpangan pada pelaporan keuangan akan muncul kemudian akan menyebabkan kebangkrutan (<https://yogyakarta.bpk.id>). Dengan adanya pengendalian internal, harapannya dapat mengurangi terjadinya kesalahan pada kegiatan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, Soerono dan Mulyasari (2019), Holle, Salle dan Sanggenafa (2019), Harnoni, Tanjung dan Darlis (2016), dan Setiawan (2017) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Gumelar (2017) diperoleh hasil yakni sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Terwujudnya tujuan organisasi, komitmen dalam organisasi sangat penting. Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan para staff atas nilai-nilai pada organisasi, sukarela dalam menunjang dan loyalitas tetap merupakan anggota organisasi demi terwujudnya tujuan-tujuan organisasi. Dengan demikian rasa ikut memiliki bagi pegawai terhadap organisasi akan timbul. Mereka akan merasa senang dan semangat dalam bekerja, sehingga mereka memiliki kesadaran yang tinggi dan tentu bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Pada penelitian Manimpurung, Kalangi dan Gerungai (2018), Pratama dan Yahya (2019) kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hernanda dan Setiyawati (2020), Putra, Merawati dan Azirona (2021) memperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan tak terlepas dari sumber daya manusia pada proses penyusunannya. Dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dipastikan bahwa dijalankan sebaik mungkin, dengan memberi kontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berkualitasnya informasi mengenai akuntansi pastinya dihasilkan dari sumber daya manusia yang berkompetensi dan berlatar belakang pendidikan pada bidang akuntansi supaya informasi tersebut sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, terhindar dari kesalahan dan terlepas dari kecurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menentukan

keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang berpengalaman dalam bekerja dan memperoleh pengetahuan yang cukup serta kurangnya kesempatan mendapat pendidikan/pelatihan sesuai tugas/bidang kerjanya (Dewi dan Hoesada, 2020).

Dalam penelitian Ramadhani, Soerono dan Mulyasari (2019), Mulyadita, Ratnawati dan Silfi (2019), dan Harnoni, Tanjung dan Darlis (2016) memperoleh hasil kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Manimpurung, Kalangi dan Gerungai (2018) menyatakan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemerintah diwajibkan agar memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi guna meningkatkan skill dalam pengelolaan pada keuangan daerah dan memberikan informasi terkait keuangan daerah kepada pelayanan publik yaitu dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet yang dibantu software akuntansi. (Mulyadita, Ratnawati dan Silfi, 2019). Hal ini dapat mempermudah dalam proses pengelolaan keuangan dengan hasil yang akurat, sehingga harapannya laporan keuangan yang didapat akan memberi informasi yang berkualitas.

Pada penelitian Ramadhani, Soerono dan Mulyasari (2019), Mulyadita, Ratnawati dan Silfi (2019) memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Harnoni, Tanjung dan Darlis (2016) memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki setiap orang dengan mengerahkan kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas beserta tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan-tujuan pada organisasi (Hasibuan, 2007). Apabila seseorang tidak memiliki motivasi maka akan menjadi sulit dalam menyelesaikan dan memperoleh sesuatu yang diinginkan. Maka dari itu motivasi dari pegawai sangat penting, hal ini menjadikan pegawai untuk semangat dalam bekerja dengan maksimal. Motivasi dapat memberikan pengaruh bagi para pegawai instansi pemerintah daerah, baik dalam berperilaku maupun bekerja. Dengan begitu motivasi kerja ini dapat menentukan baik dan buruknya kinerja seseorang.

Pada penelitian Setiawan (2017), dan Holle, Salle dan Sanggenafa (2019) memperoleh hasil bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitupun dengan penelitian Runtuwene, Saerang dan Morasa (2017) yang memperoleh hasil bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ramadhani, Soerono dan Mulyasari (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat dan objek penelitian ini dilakukan di SKPD

Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu komitmen organisasi dan motivasi kerja. Pemilihan SKPD Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian karena peneliti menemukan bahwa Kota Yogyakarta telah berhasil memperoleh penghargaan ke-12 kalinya mengenai opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2020. Hasil dari pengujian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal dan teknologi informasi berpengaruh positif. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kota Yogyakarta sehingga dapat mempertahankan predikat WTP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta?

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta?
3. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta?
5. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta.

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mungkin dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai informasi yang digunakan dalam usaha perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah serta untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan untuk membantu aparatur pemerintah daerah dalam usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lingkungan Pemerintah Daerah. Dilihat dari faktor komitmen organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman dan diharapkan dapat memberikan manfaat dari pengetahuan yang telah diperoleh selama masa kuliah di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Bagi penulis lain

Penelitian ini untuk bahan referensi dalam pengembangan peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan wawasan agar dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai akuntansi sektor publik.